

**PENERAPAN NILAI – NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GUNA MEMBANGUN SIKAP SOSIAL DAN
TANGGUNG JAWAB SISWA/I DI KELAS PADA KELAS IX.B DI SMP NEGERI 1
MERAWANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Oleh

Agustino, S.Pd.

SMP Negeri 1 Merawang
Tino70375@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi manusia, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha menggali dan mengembangkan potensi dirinya melalui metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengakomodasi berbagai isu aktual yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua tantangan baru tersebut perlu dipertimbangkan dan diakomodasikan oleh guru dalam pembelajaran Kewarganegaraan sebagai upaya penggunaan kembali Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan semangat reformasi (jika warga negara Indonesia tetap berkomitmen Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bagian dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang berjiwa demokratis maka hal ini akan berdampak positif bagi citra bangsa Indonesia dimata bangsa lain di dunia).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. peneliti memilih SMP Negeri 1 Merawang, yang berlokasi di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lokasi penelitian, karena nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran PKn sangat berkaitan dengan sikap sosial dan tanggung jawab diharapkan dapat diterapkan oleh selueuh siswa siswinya dalam proses belajar mengajar (PBM) dimana para peserta didik diajak untuk menunjukkan sikap sosial dan tanggung jawab pada dirinya dalam berbicara didepan umum, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, berpikir untuk lebih kritis dan kreatif. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari s/d April 2020.

Keyword: Nilai – Nilai Demokrasi, Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian dari kegiatan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh sebab itu kegiatan pendidikan merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa. Dengan demikian kegiatan pendidikan nasional perlu diorganisasikan dan dikelola sedemikian rupa supaya pendidikan nasional sebagai suatu organisasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha menggali dan mengembangkan potensi dirinya melalui metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat. Pendidikan tidak mengenal usia, dalam arti bahwa sampai usia tuapun manusia berhak mendapatkan pendidikan. Peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya, dengan pendidikan manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Penanaman nilai-nilai bagi peserta didik adalah sebagai upaya sadar dan terencana membantu peserta didik mengenal, menyadari, menghargai dan menghayati nilai-nilai yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan perilaku sebagai manusia dalam hidup perorangan dan bermasyarakat. Juga akan membuat peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mengerti sopan santun, mampu menghargai diri sendiri dan orang lain, bersikap hormat terhadap keluhuran martabat manusia serta memiliki rasa moral dan rohani. Hubungan antar peserta didik perlu didasari sikap sosial yang positif. Karena selayaknya apa yang telah didapatkan di sekolah merupakan bekal untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, ada yang

mempunyai kepribadian yang buruk dan baik tetapi bukan tidak mungkin untuk mengubah pribadi seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya, itulah mengapa keberadaan pendidikan sangat penting untuk mencetak pribadi-pribadi bangsa yang religius dan bermoral.

Seluruh komponen bangsa, baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan 3 bangsa melalui pendidikan. Hal ini adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 alinea IV (empat). Bangsa Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai demokrasi yaitu suatu masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis atau di dalam khasanah bahasa Indonesia disebut masyarakat madani (*civil society*) adalah suatu masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri dengan mengakui akan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sikap serta nilai yang telah diuraikan di atas yang merupakan ciri khas masyarakat demokrasi tidak datang dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu proses.

Proses tersebut adalah proses pendidikan atau dapat juga disebut sebagai proses pemanusiaan. Masyarakat madani tidak lahir dengan sendirinya karena memerlukan sistem nilai yang berbeda dengan masyarakat otoriter. Oleh sebab itu perubahan dari masyarakat otoriter dan sentralistik menuju kepada masyarakat demokratis yang mengakui akan hak-hak asasi manusia serta menghargai adanya perbedaan antar anggotanya, dan dalam hal ini memerlukan suatu proses pembentukan pribadi melalui proses pendidikan, salah satunya adalah pendidikan di sekolah dimana unsur terpenting didalamnya selain guru,

siswa, adalah pelajaran yang diperoleh siswa di sekolah. Pada umumnya proses pembelajaran Pkn yang dilaksanakan yaitu melalui pembelajaran satu arah, yaitu ceramah, siswa tidak diajak untuk turut aktif, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang menarik, karena siswa tidak memiliki tantangan dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru.

Kehidupan dunia pendidikan kita sekarang ini yang disertai dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin kompleks menuntut guru untuk dapat mengarahkan dan memotivasi siswa dalam kegiatan yang melibatkan mereka untuk bertindak secara demokratis dengan menciptakan proses belajar mengajar yang menarik, kreatif, dan inovatif, misalnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya serta berpendapat secara demokratis, tentu saja ini sangat membantu memotivasi siswa untuk merealisasikan kehidupan yang demokratis di lingkungan sekolah, dan siswa mampu menerapkannya baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat.

Seiring dengan semakin canggihnya kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih, maka pemerataan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan, dan demokratis (*democratic education*). Dalam hal ini, sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil (*mini society*) yang merupakan wahana pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis (*democratic instruction*), agar terjadi proses belajar yang menyenangkan (*joyfull learning*). Diharapkan dalam proses belajar mengajar pun siswa aktif, tertarik, dan tertantang untuk membentuk pribadinya masing-masing. Sehingga nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan dapat diwujudkan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membantuk watak serta peradaban bangsa yang bermantabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi hendaknya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata melalui suatu transformasi yaitu melalui pendidikan, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang demokratis.

2. Landasan Teori

a) Nilai-nilai Demokrasi

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu yang bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk (Soekanto, 1980: 45).

Zamroni (2001) dalam Winarno (2010: 98) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi yakni: 1) Toleransi 2) Menghargai perbedaan pendapat 3) Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat 4) Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia 5) Pengendalian diri 6) Kemanusiaan dan kebersamaan 7) Kepercayaan diri 8) Ketaatan pada peraturan yang berlaku Nilai demokrasi

secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan bertindak. Nilai yang dikemukakan diatas sesuai dengan apa yang menjadi nilai demokrasi dan perilaku yang ditanamkan dalam setiap pelajaran di kelas, yaitu perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan atau golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah dan mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi berarti sebagai berikut: a) bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisipasi); b) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dari akar kata di atas, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua arti, yaitu:

- a) Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Hal ini sesuai dengan akar kata demokrasi itu sendiri (demos: rakyat, dan cratein: memerintah). Maka secara harafiah, demokrasi berarti rakyat memerintah (Lincoln, 2003: 42-43).
- b) Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup. Demokrasi sebagai sebuah nilai tidak hanya berkaitan dengan urusan kepentingan saja, tetapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik

dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat (Tim Abdi Guru, 2006: 130)

Nilai-nilai demokrasi yang patut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat, diantaranya:

- a) Penghargaan atas kesamaan (kesederajatan);
- b) Penghargaan atas kebebasan;
- c) Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama (musyawarah untuk mencapai mufakat);
- d) Penghargaan atas perbedaan (pluralitas).

Lebih lanjut John Dewey dalam Zamroni (2007: 50) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi adalah: toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku:

a) Toleransi

Toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial dimasyarakat maupun hak-hak yang lain

b) Menghargai perbedaan pendapat

Ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Sikap menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukkan dari adanya

nilai untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain.

c) Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat

Nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku, maupun agama. Tanpa adanya kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung setinggi-tingginya dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat maka yang timbul dimasyarakat adalah perpecahan.

d) Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia

Sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia maka yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan satu dengan yang lain.

e) Pengendalian diri

Nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

f) Kemanusiaan dan kebersamaan

Sikap kemanusiaan dan kebersamaan adalah sudah menjadi salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebab sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala sesuatunya akan terasa sangat berat untuk diselesaikan.

g) Kepercayaan diri

Sikap percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan adanya kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu pada mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain.

h) Ketaatan pada peraturan yang berlaku

Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dibuat harus dilaksanakan secara bersama-sama sebab peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Ketaatan dan kepatuhan juga merupakan modal yang utama bagi setiap orang untuk mewujudkan keadilan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pembentukan perilaku dilakukan melalui pembiasaan (sosialisasi), termasuk perilaku demokratis. Wahana yang dapat dipergunakan untuk merekonstruksi perilaku demokratis adalah kelas, melalui kegiatan pembelajaran. Suasana kelas dalam proses pembelajaran mempengaruhi terjadinya proses sosialisasi. Pengembangan suasana kelas yang dilakukan guru dalam bentuk aplikasi metode mengajar secara kreatif menyebabkan suasana kelas dan pola sosialisasi menjadi demokratis, yang tercermin dari pola interaksi guru-siswa dan siswa-siswa.

B. Pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di Sekolah

Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi yaitu pendidik dan peserta didik, unsur material yaitu materi pelajaran

yang diperoleh peserta didik, fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana yang disediakan seperti ruang kelas, perlengkapan yang terdiri dari buku-buku dan literatur yang menunjang kegiatan belajar dan prosedur yaitu suatu sistem atau cara yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mata pelajaran dengan fokus pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan atau *civics* atau *civics education* adalah pendidikan atau pengajaran untuk mengembangkan kesadaran akan dirinya sebagai Warga Negara, dengan hak-hak dan berbagai tanggung jawabnya dalam diri peserta didik.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: 1) berpikir kritis terhadap isu Kewarganegaraan, 2) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 3) berkembang secara positif dan demokratis, dan 4) berinteraksi dengan bangsa lain (Priyanto, 2005: 4). Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai wahana dalam membentuk warga Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai Pancasila dan UUD 1945. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: 1) persatuan bangsa, 2) nilai dan norma, 3) hak asasi manusia (HAM), 4) kebutuhan hidup, 5) kekuasaan dan politik, 6) masyarakat demokratis, 7) pancasila dan konstitusi negara, dan 8) globalisasi (Priyanto, 2005:5).

Pendidikan Kewarganegaraan menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari materi yang dikembangkan

secara paralel dengan materi tentang nilai-nilai demokrasi yang dipusatkan pada 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional sesuai dengan UUD 1945. Kesepuluh pilar tersebut adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga Negara, demokrasi yang menetapkan konsep negara hukum, demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas dan tidak memihak, demokrasi yang menerapkan pembagian kekuasaan negara, demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.

C. Sikap Sosial

Sikap sosial merupakan sikap yang ada pada kelompok orang yang ditunjukkan pada suatu objek yang menjadi perhatian seluruh anggota kelompok tersebut. Contohnya, bangsa Indonesia mempunyai sikap positif terhadap bendera merah putih dan lain-lain. Objek ini bisa berupa benda, kelompok orang, nilai-nilai sosial, pandangan hidup, hukum, lembaga masyarakat dan sebagainya (Sarwono, 2010: 202-203). Sikap sosial ini berkaitan dengan konsep dari kecerdasan sosial yang mengartikan bahwa arti kemampuan memahami dan mengelola orang lain, sebagai keterampilan yang dibutuhkan umat manusia untuk hidup dengan baik di dunia (Goleman, 2007:15). Sikap sosial secara umum adalah kemampuan individu memahami perasaan orang lain disertai dengan kecenderungan perilaku/tindakan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang individu alami untuk hidup yang baik antar sesama manusia. Para ilmuwan sosial menyelidiki keyakinan dan perilaku orang dalam usahanya untuk menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan mental dan proses mental. Sikap

tidak dapat diobservasi atau diukur secara langsung. Keberadaannya harus ditarik kesimpulan dari hasil-hasilnya.

D. Sikap Tanggung Jawab

Penerapan sikap tanggung jawab akan diintegrasikan pada model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Implementasi sikap tanggung jawab yang diterapkan berbasis *joyfull learning*. *Joyfull learning* merupakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Proses pembelajaran yang terjadi membuat siswa senang tanpa tekanan, sehingga lebih mudah untuk menanamkan karakter pada siswa. Kembali pada hakikat pembelajaran merupakan penguasaan pengetahuan (Oemar Hamalik, 2013: 16). Istilah pembelajaran lebih dipengaruhi oleh perkembangan hasil teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar. Siswa diposisikan sebagai subjek belajar yang memegang peranan utama.

Dalam proses belajar siswa dituntut untuk beraktivitas secara penuh, guru hanya sebagai fasilitator (Wina Sanjaya, 2005: 79). Terdapat beberapa sikap penting dari istilah pembelajaran, yaitu:

1. Pembelajaran berarti membelajarkan siswa

Tujuan utama mengajar adalah membelajarkan siswa. Guru berperan sebagai orang yang membimbing dan menjadi fasilitator. Proses pembelajaran berpusat pada siswa (*student centered*). Siswa sebagai subjek belajar yang bertugas mengembangkan kemampuan dirinya, kreativitas, dan aktivitas mereka sesuai bakat yang dimilikinya.

2. Proses pembelajaran berlangsung di mana saja

Proses pembelajaran dapat berlangsung di mana saja. Kelas bukan hanya

tempat satu-satunya untuk belajar. Siswa dapat memanfaatkan berbagai tempat untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pelajaran.

3. Pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan

Tujuan pembelajaran bukan hanya penguasaan materi pelajaran, tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sejauh mana materi pelajaran yang dikuasai siswa dapat membentuk pola perilaku siswa itu sendiri.

Dari uraian makna pembelajaran dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan proses dan perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan. Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, melainkan di mana saja dapat terjadi proses pembelajaran. Proses perubahan diri siswa menuju perubahan dari pengalaman yang dialaminya disebut sebagai pembelajaran. Sedangkan Arnie Fajar (2004: 15) mengatakan kegiatan pembelajaran perlu mengembangkan aspek berpusat pada siswa, kreativitas siswa, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai, estetika, etika dan kinestetika dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Salah satu tuntutan kegiatan pembelajaran yang diinginkan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju

pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, kemudian memberikan penafsiran yang cukup dan memadai terhadap fakta-fakta yang ditemukan.

Subjek penelitian adalah siswa/i kelas IX.B SMP Negeri 1 Merawang yang berjumlah 30 orang peserta didik. Secara umum penerapan nilai-nilai demokrasi dari sikap sosial dan tanggung jawab melalui hasil belajar peserta didik dalam kelas ini sebelumnya masih dikatakan rendah.

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari informan-informan dengan cara membatasi jumlah informan, akan tetapi apabila informan atau data yang diperoleh telah lengkap, maka dengan sendirinya penelitian ini telah selesai. Data dari informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai berikut:

1. **Data Primer**, yaitu data tentang pelaksanaan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Merawang yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung dan wawancara terhadap informan lapangan. Informan lapangan yang meliputi:
 - a) Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Merawang Ibu Andriana Marsianti, S.Pd.
 - b) Siswa dan siswi SMP Negeri 1 Merawang Kelas 9 telah memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, dari sumbernya yaitu buku-buku literatur, majalah, surat kabar, makalah-makalah penelitian, arsip atau dokumen dan

sumber lain yang relevan untuk di jadikan pelengkap informasi dalam penelitian tentang Implementasi Nilai-nilai Demokrasi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Merawang.

Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan dan orientasi yang diharapkan tidak mengurangi upaya memperoleh gambaran umum yang mungkin terjadi di dalam cakupan wilayah yang lebih luas, maka dari itu peneliti memilih SMP Negeri 1 Merawang, yang berlokasi di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Metode yang di gunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000: 135). Wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut dapat dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik.

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data tentang Implementasi Nilai-nilai Demokrasi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Merawang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen

yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data-data tentang upaya yang dilakukan guru yang terkait dengan Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada peserta didik melalui mata pelajaran PKn. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Merawang Andriana Marsianti, S.Pd., dan siswa kelas 1X, dengan teknik wawancara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data tentang Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Merawang.

2. Pengamatan (*observation*)

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman, 1999: 7). Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran PKn tentang implementasi nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Merawang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian

(Rachman, 1999:96). Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen tentang presensi siswa, jadwal pelajaran, foto-foto kegiatan dan lain sebagainya.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai demokrasi yang dapat di diterapkan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Merawang dapat membangun diantaranya sikap sosial dan sikap tanggung jawab. Sikap sosial dan tanggung jawab merupakan aspek yang terkandung dalam nilai-nilai demokrasi. Selama proses pembelajaran, peneliti berusaha menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa sikap sosial merupakan sesuatu hal yang biasa tetapi tanggung jawab itu harus diutamakan karena segala sesuatu harus bias kita pertanggungjawabkan, baik dari segi pendapat, saran/ kritik ataupun tugas yang sudah diberikan.

Aspek lain yang diajarkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah kerjasama, kebebasan berkelompok dan saling menghargai. Metode pembelajaran yang dipilih peneliti berbentuk metode diskusi, Tanya jawab dan demokrasi dengan tujuan agar siswa mampu bekerjasama secara baik dengan rekan-rekannya secara berkelompok, dapat bersosial dan selalu bertanggung jawab. Peneliti memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kelompoknya, namun terkadang guru sendiri yang membagi siswa ke dalam kelompok diskusi.

Pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekolah perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki kepribadian yang kuat di tengah-tengah konflik peradaban.

Melalui hasil wawancara kepala sekolah dan peserta didik, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa nilai-nilai demokrasi sudah diterapkan oleh peneliti mulai dari rencana pembelajaran sampai dengan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikelas. Selain itu peserta didik merasa senang karena peneliti sudah menerapkan metode yang kreatif dan tidak membosankan. Selain itu metode yang digunakan seperti demokrasi, Tanya jawab dan berdiskusi membuat siswa bias lebih berani mengutarakan pendapat meningkatkan sikap sosial terhadap guru dan temannya serta belajar bertanggung jawab atas segala pendapat yang diutarakan dan tugas yang sudah diberikan guru baik individu maupun kelompok.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Merawang lebih menekankan pada sikap sosial dan sikap tanggung jawab. Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Merawang telah dilaksanakan melalui metode diskusi ,

tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Hal ini bertujuan untuk membangun sikap sosial dan meningkatkan sikap tanggung jawab peserta didik. Metode pembelajaran tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeluarkan ide, gagasan, atau pendapat mereka terkait dengan materi yang diberikan guru sehingga sikap sosial dan rasa tanggung jawab siswa/i dapat lebih terbangun. Sejak dini peneliti mengajarkan pada siswa untuk bersikap demokratis, sehingga siswa mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Disamping itu peneliti juga memberikan teladan yang baik kepada siswa bagaimana mereka membangun sikap sosial dan tanggung jawab dalam kegiatan dikelas sehari-hari.

2. Penerapan nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terbukti dapat membangun sikap sosial siswa kelas IX.B SMP Negeri 1 Merawang. Dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, penerapan metode diskusi, Tanya jawab digunakan oleh peneliti untuk menanam dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Dari proses belajar mengajar ditunjukkan oleh :

- a) Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi pada kegiatan diskusi dan tanya jawab seperti aktif pada diskusi kelompok, menyampaikan pendapat dengan santun, jelas dan dengan dasar yang kuat, menghargai pendapat teman dan teman yang sedang presentasi,
- b) Peserta sangat senang dengan metode pembelajaran seperti

diskusi dan Tanya jawab yang membuat sikap sosial mereka lebih terbuka dengan teman kelas dan guru serta dapat lebih terbuka dalam menerima/ memberi saran serta pendapat. Selain itu mereka bias membuat kelompok belajar sendiri tanpa membedakan teman dalam belajar kelompok baik dari segi akademik ataupun agama.

- c) Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi tidak hanya di kelas pada proses pembelajaran tetapi juga pada kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah seperti mengerjakan tugas kelompok yang sudah diberikan oleh guru
3. Penerapan nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terbukti dapat membangun sikap tanggung jawab siswa kelas IX.B SMP Negeri 1 Merawang. Metode pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai demokratis ini termasuk dalam proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dimana aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran adalah memberikan saran dan pertanyaan juga mendiskusikan masalah atau topik yang telah ditentukan. Sikap tanggung jawab diterapkan pada saat siswa mampu menyelesaikan tugas dan *leader* atau pemimpin kelompok bertanggung jawab untuk membimbing anggota kelompoknya menjadi yang terbaik dari kelompok lainnya. *Leader* juga bertugas untuk membimbing anggota kelompok yang kurang mampu menguasai materi pembelajaran. Metode pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai demokratis diterapkan di dalam pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan membuat siswa menjadi tidak bosan. Siswa/I juga tertarik untuk belajar Pendidikan Kewarganegaraan secara menyenangkan. serta sikap tanggung jawab pada kelompoknya hingga akhir diskusi, tidak memilih-milih anggota kelompok dan tidak diskriminatif juga terbangun dengan sendirinya.

6. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian yaitu:

1. Penerapan nilai-nilai demokrasi harus lebih dikembangkan lagi dengan menambahkan metode pembelajaran yang baru dan lebih kreatif selain dari metode diskusi, Tanya jawab dan demokrasi.
2. Penerapan metode ini mengembangkan kemampuan siswa untuk memiliki sikap sosial yang tinggi menghargai pendapat orang lain, membangun kebersamaan dikalangan siswa sehingga metode penerapan nilai-nilai demokratis harus lebih diterapkan dan lebih dikembangkan lagi baik dari metode pembelajaran dan aktivitas belajar dikelas yang lebih kreatif.
3. Penerapan metode ini mengembangkan kemampuan siswa untuk memiliki sikap tanggung jawab yang dapat dilihat dari siswa menjadi pemimpin dalam kelompok, bertanggungjawab atas tugas yang sudah diberikan, dan bertanggung jawab atas setiap pendapat yang diberikan dalam setiap diskusi. Untuk itu diharapkan Sekolah bias mengasah lagi sikap tanggung jawab dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti Latihan Dasar Kepemimpinan agar siswa dapat lebih

meningkatkan rasa tanggung jawab mereka.

7. Daftar Pustaka

- Anonim. 2002. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- , 2005. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dakir, H. 2004. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim. Sudarwan. 2003. Menjadi Komunitas Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darsono, Max, dkk. 2000. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Daryono, M. dkk. 1997. Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. 2002. Kurikulum dan Hasil Belajar. Jakarta: Puskur. Balitbang Depdiknas.
- , 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- , 2003. Pengintegrasian Life Skills ke Dalam Silabus. Jakarta: Depdiknas. Dirjen Dikdasmen.
- Hamalik, Oemar. 2003. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lincoln, A. 2003. Pengertian Demokrasi. Di akses di (<http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurut-parahli.html>)
- Miles, Mathew dan Huberman, Michail A. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah: Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munib, Ahmad. 2004. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UNNES Press.
- , 2005. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rosdakarya, Dede. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis. Jakarta: Prenada Media.
- Subagyo, dkk. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang.

- Soegito, A.T. 2004. Pendidikan Pancasila. Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang.
- Sugandi, Achmad. 2006. Teori Pembelajaran. Semarang: UPT MKK UNNES.
- Priyanto, Sugeng, At. 2005. Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Semarang: FIS UNNES.
- Tilaar, H, A, R. 2002. Pembenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Abdi Guru. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VII. Erlangga: Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, Uzer, Moh. 2002. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Widiastono, D. Tonny. 2004. Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Widjaja, H.A. W. 2000. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winanti, S. Poppy dan Hariyanto, Titok. 2004. Demokrasi dan Civil Society. Yogyakarta: IRE Press.
- Zaelani, Sukaya, Endang. H, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
- Zamroni. 2001. Pendidikan untuk Demokrasi. Yogyakarta: Bigraf Pubiishing.
- (<http://id.shvoong.com/social-sciences/2128112-pengertian-ketaatan-dan-kepatuhan>).
- (<http://uzey.blogspot.com/2009/09/pengertian-nilai.html>).